

**PENGABUNGAN GUGATAN PERKARA GANTI RUGI TERHADAP
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh
Waluyo dan Haryo Sulistyantoro
Fakultas Hukum UPN"Veteran" Jatim

Abstraks

Sebelum adanya KUHAP, jarang pemberian ganti rugi bagi pihak korban dilaksanakan melalui suatu putusan Hakim. Bagaimana tata cara pengaturannya menurut Kitab Undang—Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ? Seberapa jauh kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana itu dapat dijamin pelaksanaannya ? Pendekatan yang diutamakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada dikaji dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Prosedur penggabungan ini KUHAP melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya. Atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat setelah Hakim menerima permohonan atas tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata yang digabungkan dengan perkara pidana, telah disetujui karena tata cara atas tuntutan ganti rugi oleh penggugat sesuai dengan pasal 99 KUHAP yang berkaitan pada pasal 89 KUHAP, tentang kewenangan untuk mengadili gugatan dan kebenaran dasar gugatan serta hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat penetapan hukuman kepada tergugat atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat.

Kata Kunci : ganti rugi, ganti rugi perdata, ganti rugi pidana

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut timbullah hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini lazim disebut sebagai hubungan hukum yang telah diatur dalam perUndang-Undangan. Apabila hubungan hukum tersebut timbul di antara orang perorang atau antara pribadi satu dengan pribadi yang lain, disebut sebagai hubungan hukum perdata. Lain halnya apabila berakara dalam hukum pidana atau

hukum publik, di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Peraturan PerUndang-Undangan Hukum Pidana lainnya. Di samping itu dikemukakan pula oleh Moeljatno sebagai berikut :

“Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun satu kitab undang-undang hukum pidana (wetboek).

Dengan dcabutnya hukum acara pidana yang lama (HIR) beserta semua peraturan pelaksanaannya dan diberlakukannya hukum acara pidana yang baru (KUHAP), maka terlaksanalah

pengaturan serta tata cara peradilan yang berkenaan dengan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, baik di tingkat peradilan umum maupun Mahkamah Agung. Sistem hukum pidana Indonesia, menganut asas “Praduga tak bersalah” dan merupakan asas fundamental yang dimiliki oleh tiap tersangka atau terdakwa, di mana seseorang dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam praktek peradilan, Hakim memiliki kewenangan untuk memanfaatkan peluang yang terkandung dalam pasal 14c KUHP, dengan mencantumkan syarat khusus berupa ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Hal ini sangat menguntungkan si korban, tetapi sayangnya tidak semua Hakim mau menerapkan pasal 14c KUHP dengan alasan sepanjang menyangkut ganti rugi bukan wewenang Hakim pidana untuk memutuskannya.

Dalam memperkarakan masalah kejahatan, orang pasti langsung berpaling untuk memperkarakan si pelaku kejahatan, akhimya tidak mengacuhkan lagi korban yang menderita akibat kejahatan tersebut. Suatu perbuatan pidana tidak lagi dilihat terutama sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, tetapi sebagai suatu “pelanggaran terhadap suatu tertib hukum”.

Salah satu segi negatif sistem peradilan pidana antara lain dalam hal penyelesaian ganti kerugian, dapat memakan waktu lama dan biaya yang tinggi, sehingga kerap kali menimbulkan kesulitan bagi mereka yang tidak mampu. Sebelum adanya KUHP, jarang pemberian ganti rugi bagi pihak korban dilaksanakan melalui suatu putusan Hakim.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana tata cara pengaturannya menurut Kitab Undang—Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ? Seberapa jauh kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana itu dapat dijamin pelaksanaannya ?

METODE PENELITIAN

Sumber bahan hukum dalam peneitian ini ada dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan (Hakim) yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder meliputi kepustakaan yang menyangkut dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inyentarisasi. Dengan analisa tersebut langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas pemikiran yang runtut. Sebagai alat bantu dipergunakan metode perbandingan dan interpretasi.

Pembahasan

Dari segi bahasa, pengertian rugi sehari-hari dapat diartikan sebagai pengertian kerugian atas sesuatu akibat yang timbul. “Ganti rugi adalah uang untuk memulihkan kerugian orang” berarti di sini adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang yang merasa dirugikan sebagai akibat perbuatan orang lain. (WJS. Poerwadarminto : 1976)

Pengertian di atas tidak menjelaskan bagaimana bentuk kerugian yang diderita oleh seseorang dan apa yang menjadi penyebabnya. Besar kecilnya kerugian hanya diukur dalam wujud uang, baik untuk kerugian moril atau materiil. Misalnya untuk kerugian terhadap pencemaran nama baik seseorang. Pengertian ganti rugi sebagaimana dikemukakan di atas luas sekali sifatnya. Tidak ada batasan bahwa perbuatan yang membawa akibat kerugian orang lain itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Berarti bisa saja suatu perbuatan yang dirasakan merugikan suatu

individu masyarakat tertentu diminta ganti rugi walaupun tidak ada aturan hukumnya.

Bertitik tolak dari bidang hukum perdata, sanksi mengenai ganti rugi ini diatur dalam pasal 1365 KUHPP yang menyatakan : *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1957 BW).

Dari kedua pasal itu dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya penggantian kerugian menurut sistem hukum perdata dapat dibebankan kepada setiap pihak yang karena perbuatannya, baik bersifat lalai maupun dengan sengaja menimbulkan kerugian pihak lain, ganti rugi tersebut diberikan dalam wujud uang.

Bagaimana pengertian ganti rugi menurut sistem hukum pidana ?. Sebelum menunjuk pada suatu pasal tertentu akan saya uraian terlebih dahulu pendapat para sarjana tentang pengertian ganti rugi. Pengertian ganti rugi adalah "Biaya yang telah dikeluarkan".(M. Hanafi Asmawi: 1992)

Sedangkan pendapat lain mengartikan bahwa pengertian ganti rugi adalah: "Imbalan yang diberikan kepada seseorang yang menderita karena penangkapan dan penahanan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum⁵".(R. Susilo : 1976)

Hal tersebut juga diartikan ganti rugi sebagai imbalan, tetapi lebih sempit karena di sini dihubungkan dengan penangkapan, penahanan atau perpanjangan tentang penangkapan dan penahanan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dipertanggung jawabkan menurut hukum. Hanya saja di sini tidak menyebutkan dalam wujud apa itu harus

diberikan. Demikian juga pendapat lain menyatakan :

Segala kerugian yang diderita baik berupa kerugian yang nyata maupun biaya atas segala perongkosan yang dikeluarkan sebagai akibat tindakan penangkapan, penahanan yang dilakukan, juga menyangkut kerugian yang sifatnya immateriil, misalnya: tentang merusak nama baik

Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif pada pasal 98 KUHAP yang menggabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan. Maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan, yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan pasal 98 KUHAP ini menjadi tunduk pada hukum acara pidana.

Pasal 98 KUHAP menyatakan, bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. Dari rumusan pasal 98 KUHAP dapat disimak maknanya bahwa untuk dapatnya penggabungan perkara ini diperlukan tiga persyaratan, yaitu :

1. Adanya perbuatan terdakwa.
2. Adanya perbuatan terdakwa sebagai syarat pertama tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Adanya permintaan dan pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas adalah perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang

dan diancam dengan pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian kerana kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian. Jadi antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karenanya antara kejadian dan orang yang membuat kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Dikatakan di atas adanya penggabungan perkara haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, "Kerugian bagi orang lain" ialah kerugian pihak ketiga termasuk saksi korban. Seperti telah dikatakan sebelumnya adanya penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana ini tidak lain disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh si korban. Kerugian di sini berwujud kerugian materiil. Untuk kerugian yang bersifat immateriil, misalnya mencemarkan nama baik sudah diatur oleh KUHAP dalam bab tersendiri dengan menggunakan upaya hukum lain. Namun demikian tidak selalu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan sebagaimana yang diuraikan itu dengan sendirinya selalu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Kapan dikatakan kerugian yang timbul itu akibat perbuatan terdakwa ? jika kerugian tersebut secara hukum ada sebab akibat dengan perbuatan terdakwa.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa sebenarnya tuntutan ganti rugi menurut pasal 98 KUHAP ini bersifat perdata, tetapi diberikan melalui acara pidana. Guna memberikan perlindungan bagi korban perbuatan pidana, maka kepada korban diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan ganti rugi itu melalui penggabungan perkara perdatanya dengan perkara pidana.

Namun demikian KUHAP tidak mengatur secara rinci dan tuntas mengenai bagaimana tata cara penggabungan perkara ini. Pasal 98 KUHAP hanya menjelaskan tentang waktu gugatan itu dapat diajukan, antara lain :

1. Gugatan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan, misalnya mengenai perkara lalu lintas.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan proses mana yang dianut, apakah masuk proses pidana ataupun masih proses perdata. Kalau melihat proses perkara penggabungan ganti rugi secara keseluruhan menurut hemat saya KUHAP tidak berat sebelah, artinya tidak menekankan pada salah satu pembuktian itu, tetapi secara berimbang memakai kedua sistem pembuktian itu. Oleh karenanya jelas kalau dalam proses pasal 98 KUHAP ini Hakim menggunakan kedua sistem pembuktian di atas. Untuk perkara pidana memakai sistem pembuktian negatif, baru kemudian dalam pemeriksaan gugatan ganti ruginya Hakim menggunakan sistem pembuktian positif berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah didapat dalam proses pidananya.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat 2, diterangkan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin, sehingga dapat terpicu oleh rakyat (ditinjau dari segi kemampuan rakyat biasa).

Melalui pasal 98 KUHAP dicoba untuk mewujudkan apa yang diharapkan, yaitu suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian persoalannya tidak begitu mudah dalam pelaksanaannya. Sudah dipahami bahwa proses perdata bukan cara yang dikehendaki oleh karena berbelit-belit dan mahal biaya bagi rakyat yang kurang mampu. Tetapi tidak berarti prosedur penuntutan ganti rugi melalui KUHAP ini telah

sempurna sesuai dengan cita-cita pencari keadilan. Paling tidak KUHAP telah berusaha mewujudkan keinginan pencari keadilan.

Menurut pasal 100 KUHAP apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan ini dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Berarti perkara perdatanya baru memperoleh kekuatan hukum tetap apabila perkara pidananya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibatnya tidak ada putusan perdata atau ganti rugi yang dapat dijalankan jika tidak ada putusan pidana yang bersifat tetap.

Apabila ada suatu perkara penggabungan gugatan ganti rugi terhadap putusan perkara perdatanya terdakwa menerima, tetapi tidak untuk pidananya, maka putusan perdatanya tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu menunggu sampai putusan pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya apabila terdapat putusan perkara pidananya terdakwa menerima, tetapi tidak untuk putusan ganti ruginya, terdakwa tidak berhak mengajukan banding. Demikian pula halnya penggugat. Penggugat kehilangan haknya untuk naik banding mengenai putusan ganti rugi apabila terdakwa menerima putusan perkara pidananya. Hal ini sesuai sifat tuntutan ganti rugi itu sendiri yang mengikuti perkara pidananya.

Menurut hukum pidana, Pengadilan Negeri hanya berwenang terhadap perkara yang terjadi di wilayah hukumnya. Namun demikian Pengadilan Negeri berhak memeriksa perkara yang perbuatannya dilakukan di luar wilayah hukumnya bila mana terdakwa di luar negeri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang. Bila mana terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya maka persidangan dilakukan di tempat di mana saksi-saksi itu lebih banyak diketahui.

Contoh kasus penggabungan ganti rugi. Pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 1998, jam 20.00 WIB. Di jalan Raya Gedangan, Kecamatan Gedangan,

Kabupaten Sidoarjo terdakwa Iwan Suroto dengan membonceng saksi Sumiati mengendarai sepeda motor dengan nomor Polisi L-7383-GA dari arah Selatan ke Utara.

Pada waktu mendahului atau menyalip kendaraan yang berada di depannya, padahal pandangan depan belum bebas, sehingga memakai jalan terlalu ke tengah atau memakai jalur jalan kendaraan yang datangnya dari Utara menuju ke Selatan. Akibatnya tidak dapat dihindari oleh terdakwa Iwan Suroto ialah terjadi tabrakan dengan kendaraan saksi Sudarsono yang membonceng saksi Siswandi. Dengan terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa Iwan Suroto menderita tak sadarkan diri dan luka-luka, sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Sedangkan saksi Sudarsono menderita luka-luka di lutut dan paha kiri, sehingga tidak dapat berjalan seperti biasanya, serta sepeda motonya rusak. Mengenai biaya pengobatan dan biaya kendaraan ditanggung saksi sendiri yaitu Sudarsono.

Saksi Sumiati pada waktu kecelakaan terjadi dia jatuh pingsan di tempat kejadian, serta menderita luka robek pada bagian kepala sebelah kanan.

Saksi Siswandi sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan melihat ke depan ada kendaraan sepeda motor milik terdakwa berjalan ke tengah ke arah kendaraanya. Pada waktu itulah saksi memaksakan diri meloncat dari kendaraannya sehingga jatuh dan luka ringan pada siku tangan sebelah kanan dan kiri.

Dengan adanya kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 1998 di Jalan Raya Gedangan antara saksi Sudarsono yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Astra nomor Polisi L-247-BA dari arah Utara ke Selatan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Selatan ke Utara. Saksi di tabrak oleh terdakwa Iwan Suroto yang melanggar as jalan.

Sebagai akibat ditabrak, saksi Sudarsono opname di rumah sakit umum

Sidoarjo selama 3 hari ditambah cuti dokter selama 5 hari biaya seluruhnya kurang lebih Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), ditambah perbaikan kendaraan saksi sebesar (sembilan puluh ribu rupiah).

Permohonan tuntutan ganti rugi tersebut sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa Iwan Suroto dengan disertai bukti kwitansi biaya perbaikan kendaraan sepeda motor saksi dan pengobatan.

Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan perkara nomor: 196/Pid/S/B/1998/PN.Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan perkara perdata ganti rugi tersebut sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 10 Januari 1999 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa majelis Hakim setelah mempelajari isi gugatan penggugat mengenai ganti rugi akibat kealpaan tergugat menyebabkan orang lain menderita luka-luka, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan luka-luka akibat kealpaan tergugat, maka penggugat dirawat di rumah sakit umum Sidoarjo selama 3 hari dan sepeda motor milik penggugat rusak, dengan biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor ditanggung oleh penggugat yang menelan biaya sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan sebagai ganti rugi akibat kealpaan yang dilakukan tergugat;

Menimbang, bahwa berapa jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan yang layak dan patut dengan memperhatikan keadaan ekonomi tergugat atau terdakwa;

Menimbang, bahwa dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas patut dan layak tergugat menggantikan kerugian uang sebesar jumlah kwitansi dan pengeluaran lain, sehingga berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada penggugat.

Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya, mengadili;

Menyatakan terdakwa Iwan Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP atau “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka”.

Menghukum, oleh karenanya dengan hukuman 3 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan, yaitu karena sebelumnya masa percobaan selama 6 bulan terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Memerintahkan barang bukti berupa: STNK L-7383-GA, SIM C Nomor: 004759/7/YU/1022 dan sepeda motornya dikembalikan kepada terdakwa Iwan Suroto: STNK L-247-BA dan sepeda motor beserta SIM C Nomor: 012100/2/C/YIU/94/1092 dikembalikan kepada saksi Sudarsono.

Pertimbangan hukum dalam perkara pidana :

Menimbang, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara serta mendengarkan keterangan pengakuan dari para pihak yang berperkara, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhkan hukuman serta untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan hukum dalam perkara perdata :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 ayat (1) KUHP penggabungan perkara dengan ganti rugi hanyalah terbatas pada kerugian materiil bagi korban. Jadi hanyalah terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Sekaligus tuntutan yang lain tidak

diterima, dan harus diajukan sebagai gugatan perdata.

Demikian putusan Pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo baik dalam pertimbangan maupun keputusannya dalam perkara pidana dan perkara perdata.

Mengenai pelaksanaan ganti rugi ini tentunya pertama-tama berkaitan erat dengan bagaimana bunyi putusan Hakim atau tindakan yang dilakukan terdakwa. Menurut pasal 101 KUHAP ada tiga jenis putusan, yaitu :

- Dipidana atau dihukum.
- Dibebaskan yaitu bilamana perbuatan itu tidak terbukti.
- Dilepaskan, bilamana perbuatan itu terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.

Terhadap jenis putusan yang bagaimanakah permohonan ganti rugi tersebut dapat dikabulkan ?

Menurut hemat saya tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan terhadap jenis putusan yang pertama, sebab di sini jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa itu melanggar hukum pidana dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Hak menuntut ganti rugi ini diberikan kepada penderita atau korban yang secara langsung menderita kerugian, tetapi tidak menutup kemungkinan ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi. Ahli waris tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan piutang atau akibat perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh pewarisnya, tetapi juga berhak untuk menerima segala keuntungan yang ditinggalkan pewarisnya.

Setelah dijelaskan siapa saja yang berhak menuntut ganti rugi itu, timbul pertanyaan : Siapa saja yang berhak membayar ganti rugi ? dalam hal ini jelas kalau terdakwa yang secara langsung menimbulkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti rugi. Apabila sebelum eksekusi terdakwa meninggal, maka keluarga korban wajib melunasi pembayaran ganti rugi tersebut.

Selain itu pemberian kuasa atau orang yang bertanggung jawab berdasarkan pasal 1365, 1367 KUHP, juga bertanggung

jawab untuk membayar kerugian apabila perbuatan terdakwa terbukti bersalah.

Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya selesai diputus, maka gugurlah hak untuk menuntut pidananya dan sekaligus para ahli warisnya terbebas untuk melunasi ganti rugi itu. Hal ini adalah layak karena kejahatan hanya dapat dituntutkan kepada orang yang melakukannya.

Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan, dalam pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang untuk panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.

Tetapi apabila diteliti rangkaian pasal-pasal KUHAP selanjutnya yaitu pasal 271 sampai pasal 276, yang termuat dalam bab XIX tentang pelaksanaan putusan Pengadilan, maka yang dimaksud putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum tersebut adalah putusan Pengadilan yang berdasarkan hukuman pokok sebagaimana dalam pasal 101 KUHAP yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tutupan (UU. No.20 tahun 1946). Sedangkan untuk hukuman tambahan tidak diatur sebagaimana pelaksanaannya. Untuk putusan Pengadilan mengenai penggabungan perkara, pelaksanaannya diatur oleh pasal 274 KUHAP yaitu dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dikatakan oleh pasal 274 KUHAP bahwa dalam hal Pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 KUHAP, maka pelaksanaannya menurut tata cara peraturan perdata.

Menurut tata cara putusan perdata, putusan mengenai ganti rugi ini dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 33 UU. No. 14 tahun 1970 jo pasal 274 KUHAP) yang menyatakan bahwa dalam hal ini Pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 KUHAP, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Adapun putusan Hakim yang memerlukan

pelaksanaan ialah putusan yang bersifat menghukum, pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dan pihak yang dikalahkan, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan suka rela melaksanakan putusan itu dan bersedia memakai kewajiban untuk berprestasi dibebankan oleh Hakim lewat putusannya.

Apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan Hakim, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara itu baik secara lisan maupun tertulis supaya putusan itu dilaksanakan. Untuk itu Ketua Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkan supaya ia melaksanakan putusan itu selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari (pasal 196 HIR, 207 Rbg.).

Apabila dalam tempo 8 hari itu putusan Hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah setelah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memerintahkan secara tertulis supaya melakukan penyitaan atau barang-barang bergerak milik pihak yang kalah, sejumlah harga yang harus dibayarkan ditambah ongkos pelaksanaan putusan. Apabila barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka dilaksanakan penyitaan atau barang-barang yang tidak bergerak (pasal 197 ayat 1-208 Rbg.).

Dalam hal terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka keluarga terdakwa ikut bertanggung jawab atau memenuhi ganti rugi tersebut. Apabila pemenuhan ganti rugi ini terlaksana, maka akan sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. (Abdurrahman dan Ridwan Syabrani : 1997)

Tidak demikian halnya apabila keadaan sosial ekonomi terdakwa secara pribadi dan keluarganya lemah, sehingga tidak mampu untuk memenuhi putusan ini, hal ini akan membuahkan rasa kecewa bagi diri pencari keadilan atau bagi pihak korban, karena

hanya merupakan kemenangan di atas kertas belaka.

Oleh karenanya pihak korban yang akan mengajukan tuntutan ganti rugi melalui prosedur penggabungan perkara ini harus betul-betul mempertimbangkan dan memperhatikan dan segi positif dan segi negatifnya.

Kesimpulan sementara mengenai pelaksanaan ganti rugi ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR, sebab khusus untuk hukum acara perdata masih berlaku ketentuan yang ada dalam HIR (untuk pulau Jawa dan Madura) dan Rbg. untuk luar pulau Jawa dan Madura.

Pada dasarnya penggabungan perkara seperti yang dimaksud dalam pasal 98 KUHAP ini adalah penggabungan sementara. Mengenai prosedur penggabungan ini KUHAP melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus, yang pertama proses pidana kedua dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Dengan pasal 98 KUHAP yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di dunia perdata dan pidana bisa dipertemukan yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan pasal 98, KUHAP menjadi diatur oleh hukum acara pidana. Penggabungan ini terjadi atas permintaan orang yang merasa dirugikan. Secara rinci untuk adanya penggabungan perkara diperlukan tiga syarat, yaitu: Pertama, adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya yang menjadi dasar

dakwaannya. Kedua, timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut. Ketiga, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada Hakim. Mengenai prosedur penggabungan ini KUHAP melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya.

Saran

Setelah memahami keseluruhan dari penggabungan perkara ganti rugi, maka ada beberapa saran yang dikemukakan berikut ini :

Untuk menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan korban, sebaiknya KUHAP tidak meletakkan pasal 100 ayat 2. walaupun terdakwa telah menerima putusan pidana maupun perdatanya, sebaiknya hak korban untuk banding atau kasasi tetap dihormati sebagaimana layaknya yang ada dalam proses beracara melalui gugatan perdata murni. Tentang dikabulkan atau tidaknya banding atau kasasi dari korban diserahkan saja kepada tingkat peradilan yang lebih tinggi dengan syarat tidak boleh dikait-kaitkan perkara pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syabrani, 1978. **Hukum dan Peradilan. Alumni**, Bandung.
- M. Hanafi Asmawi, 1989. **Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP**, Pradya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Karyadi dan R. Soesilo, 1983. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar**, Politiea, Bogor.
- R. Susilo, 1991, **Menahan, Menangkap dan Pembebanan Ganti Rugi**, Politeia, Bogor, t.th.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, 1985. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**, Cet. XIX, Pradya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1980. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. XX, PT. Intermasa, Jakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Sekretariat Negara Republik Indonesia*, Percetakan Negara Republik Indonesia.
- WJS. Poerwadarminta, 1976. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cet. Y, Balai Pustaka, Jakarta